RINGKASAN

“ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA KELEMBAGAAN PENGELOLA HUTAN ADAT BUKIT BUJANG DUSUN SENAMAT ULU KECAMATAN BATHIN III ULU KABUPATEN BUNGO” (Skripsi oleh Silvi Agustina di bawah bimbingan bapak Dr. Ir. Fazriyas, M.Si., IPU dan Ibu Riri Oktari Ulma, S.P., M.Si).

Keberadaan hutan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat sekitar. Pemerintah melalui kebijakan perhutanan sosial memberikan akses kelola kepada masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat pada skema Hutan Adat. Salah satu Hutan Adat di Indonesia adalah Hutan Adat Bukit Bujang yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA). Efektivitas kinerja kelembagaan menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan hutan adat, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui sejauh mana LPHA Bukit Bujang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran umum kelembagaan Hutan Adat Bukit Bujang dan menganalisis tingkat efektivitas kinerja kelembagaannya.

Penelitian ini berlokasi di Hutan Adat Bukit Bujang, Dusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 30 orang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan skala Likert. Selain itu, untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja, penelitian ini juga menerapkan prinsip-prinsip Ostrom (1990), yang terdiri dari delapan prinsip kelembagaan berkelanjutan.

Hasil penelitian didapatkan bahwa kondisi kelembagaan Hutan Adat Bukit Bujang telah berjalan cukup baik di mana LPHA Bukit Bujang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun, pengelolaan kawasan seluas 223 hektar dengan hanya 16 orang pengurus masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun kapasitas sumber daya manusia. Dari sisi efektivitas kinerja kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dengan nilai rata-rata persentase skor 66,11%. Ada 5 (lima) kriteria penilaian yang terbilang efektif yaitu batas-batas teridentifikasi dengan jelas dengan skor persentase mencapai 77,78%, kesesuaian aturan dengan kondisi setempat dengan skor persentase 66,67%, sanksi yang tegas sesuai tingkat kesalahan dengan skor persentase 66,67%, mekanisme penyelesaian konflik dengan skor persentase 76,67%, dan pengakuan hak untuk mengelola dengan skor persentase 80%.